

**Pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan terhadap
Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)
pada Pemerintah Kota Yogyakarta**

Arif Miftahurrohman¹, Bangun Putra Prasetya²

Email: miftahpro59@gmail.com¹, bangunputraprasetya@gmail.com²

^{1,2} Universitas Widya Mataram

Abstract

Regulations issued by the government, such as regional autonomy, mean that regional governments have the rights, authority and obligations of autonomous regions to regulate and manage government affairs and the interests of local communities themselves in the system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, local governments have a big responsibility in providing services to the community by paying attention to the financial conditions of local governments. Where the financial condition is good if the financial condition is sustainable. Financial sustainability is the government's ability to maintain or improve community welfare by providing public services in quantity and quality now and for the future. In order to know the condition of financial sustainability, it is very important for local governments to better understand what factors can influence the level of financial sustainability so that local governments can make good and appropriate decisions to provide services to the community in a sustainable manner. This research aims to determine the influence of financial independence and financial performance on financial sustainability (financial sustainability ratio) in the Yogyakarta City Government. The period in this research is 2013 to 2022. This research uses a quantitative approach. The research population includes the Yogyakarta City Government with an observation period from 2013 to 2022. The sample selection technique uses a purposive sampling method with the help of the SPSS version 27 program. The data analysis method used is hypothesis testing. The results of this research show that partially the Financial Independence variable has a positive and significant effect on the Financial Sustainability Ratio and the Financial Performance variable has a negative and significant effect on the Financial Sustainability Ratio. Meanwhile, simultaneously the Financial Independence variable and the Financial Performance variable have a positive and significant effect on the Financial Sustainability Ratio.

Keywords: *financial independence, financial performance, financial sustainability.*

Abstrak

Regulasi yang dikeluarkan pemerintah seperti adanya otonomi daerah membuat pemerintah daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dimana kondisi keuangan yang baik jika kondisi keuangannya yang berkelanjutan. Keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik secara kuantitas dan kualitas pada saat ini dan untuk masa depan. Agar dapat mengetahui kondisi keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) sangat penting bagi pemerintah daerah untuk lebih memahami lagi apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemandirian keuangan dan

kinerja keuangan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability rasio*) pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Periode dalam penelitian ini adalah tahun 2013 sampai 2022. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi Pemerintah Kota Yogyakarta dengan periode pengamatan 2013 sampai 2022. Teknik pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan bantuan program SPSS versi 27. Metode analisis data yang digunakan adalah uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Kemandirian Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Sustainability Ratio dan variabel Kinerja Keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Financial Sustainability Ratio. Sedangkan secara simultan variabel Kemandirian Keuangan dan variabel Kinerja Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Financial Sustainability Ratio.

Kata Kunci: kemandirian keuangan, kinerja keuangan, keberlanjutan keuangan.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas dan terbagi menjadi banyak daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang dan bertanggung jawab akhir kepada pemerintah pusat. Menurut UU Nomor 23 tahun 2014, “Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah (UU Nomor 23 tahun 2014). Salah satu tujuan diberakukannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada diwilayahnya. Dengan begitu diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, sehingga mampu membiayai keuangannya secara mandiri.

Kemandirian ekonomi pada sektor pemerintahan / publik dalam ilmu manajemen dikenal dengan istilah *sustainable*. Salah satu indikator dalam penilaian ketercapaian keberlanjutan keuangan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Suatu daerah yang memiliki perolehan PAD yang tinggi maka semakin tinggi pula kemandirian dalam daerah tersebut khususnya dalam kemandirian ekonomi sehingga daerah tersebut dapat dikatakan bahwa memiliki pertumbuhan perekonomian yang baik. Akan tetapi, ada juga dari fakta yang terjadi dalam suatu wilayah masih sulit menyeimbangkan jumlah PAD sehingga ketidakseimbangan ini akan dapat menimbulkan ketidakmerataan pembangunan daerah. Dimana faktor penyebab terjadinya adalah adanya perbedaan potensi yang dimiliki pada setiap daerah.

Kota Yogyakarta merupakan salah satu kota yang terdampak kebijakan otonomi daerah sesuai undang-undang perda. Oleh sebab itu, kota Jogja berkewajiban untuk mencapai kemandirian ekonomi didasarkan pada konsep berkelanjutan keuangan dalam perspektif ilmu manajemen keuangan. Pencapaian keuangan dalam beberapa literatur

keuangan yang ada dipengaruhi oleh faktor PAD dan jumlah penduduk. Berdasarkan data pertanggungjawaban dari Pemkot, Jogja mengalami tren menurun. Tren penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto), inflasi, pengeluaran pemerintah, jumlah wisatawan, dan jumlah penduduk.

Jumlah penduduk kota Jogja dari tahun ke tahun mengalami penambahan. Berdasarkan data dari BPS (Badan Pusat Statistik) dari tahun 2017-2022 jumlah penduduk kota Jogja mengalami tren meningkat.

Tabel 1. Tabel pertumbuhan PAD dan penduduk

Tahun	PAD	Jumlah Penduduk
2017	657.049.376.703,22	422.363
2018	667.493.075.470,14	427.801
2019	689.049.725.509,27	433.267
2020	563.174.371.396,88	438.761
2021	598.121.885.337,87	444.295
2022	482.269.519.901,00	449.890

Pada tabel 1. terlihat bahwa PAD Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan dalam setiap tahunnya, sedang jumlah penduduk bertambah dari tahun ke tahun. PAD merupakan indikator penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu daerah. Jumlah penduduk yang terus bertambah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik.

Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kondisi keuangan pemerintah daerah. Dimana kondisi keuangan yang baik jika kondisi keuangannya yang berkelanjutan. Keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) merupakan suatu kemampuan pemerintah untuk memelihara atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik secara kuantitas dan kualitas pada saat ini dan untuk masa depan (Bisogno dkk, 2017).

Keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memahami apa saja faktor yang dapat mempengaruhi tingkat keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) sehingga pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang baik dan tepat untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Subires dkk, (2019) menyatakan bahwa jika pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan eksternal yang lebih banyak daripada internalnya memungkinkan adanya risiko yang dapat menghambat keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*), sehingga dengan mengoptimalkan kemandirian keuangan, pemerintah daerah dapat mendorong faktor untuk tercapainya keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*).

Oleh karena itu, beberapa peneliti sebelumnya telah meneliti topik serupa dimana penelitian keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) rata-rata dilakukan penelitian pada ruang lingkup sektor privat seperti Bank. Pada sektor pemerintah, penelitian mengenai keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) masih sedikit dan kebanyakan di negara-negara Eropa, Australia dan Amerika. Diantara penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan Bolivar dkk, (2014), dan Subires dkk, (2019) melakukan

penelitian mengenai *Financial Sustainability* tetapi berfokus pada pembahasan sosial-demografi dan penggabungan daerah.

Di Indonesia, penelitian yang terkait dengan keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) yaitu oleh Putri Patli Aryasi dkk (2023) berjudul “Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap *Financial Sustainability* Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara parsial variabel kemandirian keuangan dan efisiensi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial sustainability*, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial sustainability*. Secara simultan kemandirian keuangan, efisiensi keuangan dan kinerja keuangan secara bersama-sama memiliki pengaruh dan signifikan terhadap *financial sustainability*.

Penelitian berikutnya yaitu oleh Iqbal & Harpa (2022) berjudul “Keberlanjutan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai dampak negatif terhadap keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sementara itu kemandirian keuangan mempunyai dampak positif terhadap keberlanjutan keuangan (*Financial Sustainability*) pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan berpengaruh terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*) pada Pemerintah Kota Yogyakarta baik secara parsial maupun simultan?

Batasan Penelitian

Peneliti membatasi penelitian hanya pada dua variabel yaitu variabel Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan meskipun didalam fenomena ada berbagai permasalahan yang layak untuk diteliti. Tetapi karena faktor keterbatasan berbagai hal dan faktor kepentingan penelitian maka hanya menggunakan dua variabel tersebut dalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*) pada Pemerintah Kota Yogyakarta baik secara parsial maupun simultan.

KAJIAN TEORI

Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)

Pengelolaan keuangan menjadi masalah yang penting di setiap daerah karena berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pengelolaan keuangan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Menurut Subires & Bolivar (2017) pengelolaan keuangan sebagai akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat mengalami perubahan yang pada awalnya berpedoman pada indikator kondisi keuangan dan kesulitan keuangan, saat ini beralih menuju keberlanjutan keuangan. Kondisi keuangan (*financial condition*) dan kesulitan keuangan (*fiscal distress*) mempunyai dasar

pada informasi keuangan historis sedangkan keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*) memberikan informasi yang bermanfaat tidak hanya untuk mengantisipasi dan menyelesaikan risiko, namun bertujuan menjaga pelayanan kepada generasi mendatang dengan kualitas dan jumlah layanan publik yang sama.

Financial sustainability juga mengacu pada kondisi keuangan dan kesehatan fiskal yang mewakili kemampuan untuk mematuhi kewajiban saat ini dan masa depan melalui arus masuk yang tepat dengan pajak, transfer dan layanan untuk mempertahankan tingkat kualitas pelayanan kepada masyarakat (Brusca et al., 2015). *Financial sustainability* dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk memberikan layanan saat ini tanpa mengurangi kemampuannya untuk melakukannya di masa depan, dan itu adalah konsep yang lebih luas meliputi tiga dimensi yang saling berkaitan, dimensi tersebut meliputi layanan, pendapatan, dan utang (Rodríguez Bolívar et al., 2018).

Kemandirian Keuangan

Menurut Muliana (2009), kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Halim (2014), gambaran citra kemandirian daerah dalam otonomi dapat diketahui melalui seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan untuk daerah tersebut, agar mampu membangun daerahnya disamping mampu pula untuk bersaing secara hebat dengan daerah lainnya dalam mencapai otonomi yang sesungguhnya. Tingkat kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi pula.

Kinerja Keuangan

Pengertian kinerja keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas (Jumingan, 2006). Kinerja keuangan merupakan gambaran dari pencapaian keberhasilan perusahaan dapat diartikan sebagai hasil yang telah dicapai atas berbagai aktivitas yang telah dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menetapkan unit penelitian sesuai dengan permasalahan yang diteliti mengenai kemandirian keuangan dan kinerja keuangan yaitu data laporan keuangan Pemkot Kota Yogyakarta periode 2013-2022 yang sumber datanya diperoleh dari Publikasi Laporan Keuangan Pemkot Kota Yogyakarta.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk menjangkau informasi kuantitatif dari responden sesuai lingkup penelitian. Tujuan dilakukannya pengumpulan data yaitu untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yaitu dengan cara mencari serta mengumpulkan data yang berkaitan dengan variabel yang berupa buku,

jurnal, transkrip, surat kabar dan literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian. Dokumentasi didapatkan berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun 2013 sampai 2022 yang dipublikasikan di website Pemkot Kota Yogyakarta. Untuk prosedur pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan penelitian kepustakaan dari situs <https://jdih.jogjakota.go.id/> serta mengkaji berbagai buku-buku, jurnal dan literatur lainnya untuk memperoleh landasan teoritis yang menyeluruh tentang bank syariah, serta melakukan eksplorasi laporan-laporan keuangan dengan tujuan data yang diperoleh untuk penelitian dari variabel yang terukur dengan jelas.

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian dan untuk menguji pengaruh kemandirian keuangan dan kinerja keuangan terhadap keberlanjutan keuangan (*financial sustainability*), digunakan pengujian hipotesis secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t (T – test)

Uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen Y dalam model regresi yang sudah dihasilkan. Maka digunakan uji t untuk menguji masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Gulla et al., 2015). Untuk menentukan kriteria pengujian hipotesis penelitian:

1. Hipotesis diterima jika t signifikan $< 0,05$
2. Hipotesis ditolak jika t signifikan $> 0,05$

Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji t

Coefficients ^a				
	Model	T	Sig.	Keterangan
	(Constant)	-0,796	0,462	
1	KEMKEU	2,585	0,049	Berpengaruh
	KIKEU	-3,675	0,014	Berpengaruh

a. Dependent Variable: FSR

Pengaruh Kemandirian Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)

H_1 = Kemandirian Keuangan (KEMKEU) berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji t variabel KEMKEU mempunyai t hitung sebesar 2,585 dengan signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel KEMKEU berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa KEMKEU berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*, sehingga hipotesis pertama diterima.

Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Keberlanjutan Keuangan (*Financial Sustainability*)

H_2 = Kinerja Keuangan (KIKEU) berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kota Yogyakarta.

Berdasarkan tabel 2 hasil uji t variabel KIKEU mempunyai t hitung sebesar -3,675 dengan signifikansi sebesar 0,014. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel KIKEU berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*. Hal tersebut sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa KIKEU berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F Statistik)

Uji F hitung dimaksudkan untuk menguji model regresi atas pengaruh seluruh variabel independen secara simultan terhadap dependen. Uji ini dapat dilihat pada nilai F-test. Nilai F pada penelitian ini menggunakan tingkat signifikansi 0,05, apabila nilai signifikansi $F < 0,05$ maka model regresi memenuhi, sedangkan apabila signifikansi $F > 0,05$ maka model regresi tidak memenuhi. Hasil pengujian menggunakan uji F dapat dilihat dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA			
Model	F	Sig.	Kesimpulan
Regression	5,422	0.038 ^b	Signifikan

Dari tabel tersebut, diperoleh F hitung sebesar 5,442 dan signifikansi sebesar 0,038. Terlihat bahwa nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh Kemandirian Keuangan (KEMKEU) dan Kinerja Keuangan (KIKEU) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability Ratio*

Hasil uji t variabel Kemandirian Keuangan mempunyai t hitung sebesar 2,585 dengan signifikansi sebesar 0,049. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*, sehingga hipotesis pertama dapat diterima.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Putri Patli Aryasi, dkk (2023) dan Iqbal & Harpa (2022) yang menunjukkan bahwa *Financial Sustainability* dipengaruhi oleh Kemandirian Keuangan.

Pengaruh positif Kemandirian Keuangan terhadap *Financial Sustainability Ratio* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta dapat meningkatkan pelayanan yang berkelanjutan. Semakin tinggi rasio Kemandirian Keuangan, maka *Financial Sustainability* juga akan mengalami kenaikan. Pengaruh kemandirian keuangan dengan *Financial Sustainability*

pada Pemerintah Kota Yogyakarta dimana jika rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan, maka *Financial Sustainability* juga akan mengalami kenaikan, begitu pula sebaliknya.

Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability Ratio*

Hasil uji t variabel Kinerja Keuangan mempunyai t hitung sebesar -3,675 dengan signifikansi sebesar 0,014. Nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan berpengaruh signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Putri Patli Aryasi, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan mempengaruhi *Financial Sustainability* secara negatif.

Pengaruh negatif Kinerja Keuangan terhadap *Financial Sustainability Ratio* pada penelitian ini berpengaruh secara signifikan. Artinya, nilai Kinerja Keuangan atau hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat dikelola dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami defisit anggaran sehingga dengan sumber daya (aset) yang ada tidak cukup untuk menutupi defisit anggaran dengan tujuan memberikan pelayanan publik yang berkelanjutan. Akan tetapi, return on asset berpengaruh negatif juga dapat digunakan untuk memprediksi kegagalan pemerintah daerah sehingga akan bermanfaat untuk keberlanjutan keuangan pemerintah daerah di masa yang akan datang (Indriaty dkk., 2019). Pengaruh Kinerja Keuangan dengan *Financial Sustainability* pada Pemerintah Kota Yogyakarta dimana jika rasio Kinerja Keuangan mengalami kenaikan, maka *Financial Sustainability* akan mengalami penurunan, begitu pula sebaliknya.

Hasil uji F variabel Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan menunjukkan bahwa variabel Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financial Sustainability Ratio (FSR)*, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

Hasil penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian dari Putri Patli Aryasi, dkk (2023) dan Iqbal & Harpa (2022) yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama *Financial Sustainability* dipengaruhi oleh Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan yang berdasarkan hasil uji t, variabel Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan mempengaruhi *Financial Sustainability Ratio* secara parsial dengan hasil pengujian signifikansinya Kemandirian Keuangan 0,049 dan Kinerja Keuangan 0,014. Berdasarkan hasil uji F, variabel Kemandirian Keuangan dan Kinerja Keuangan berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Financial Sustainability Ratio*. Hal ini ditunjukkan dari hasil pengujian diperoleh F hitung sebesar 5,442 dan signifikansi sebesar 0,038.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryasi, P. P., Periansya, P., & Dwitayanti, Y. (2023). Pengaruh Kemandirian, Efisiensi dan Kinerja Keuangan Terhadap Financial Sustainability Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Bagian Selatan.
- Bisogno, M., Cuadrado-Ballesteros, B., & García-Sánchez, I. M. (2017). Financial sustainability in local governments: Definition, measurement and determinants. In *Financial Sustainability in Public Administration: Exploring the Concept of Financial Health*.
- Bröthaler, J., Getzner, M., & Haber, G. (2015). Sustainability of local government debt: a case study of Austrian municipalities. *Empirica*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. (2014). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2007). *Standar Akuntansi Keuangan per 1 September 2007*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jumingan, (2006). *Analisis Laporan Keuangan, Cetakan Pertama*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Muliana. (2009). Pengaruh Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Sumatera Utara.
- Rodríguez Bolívar, M. P., Navarro Galera, A., López Subirés, M. D., & Alcade Muñoz, L. (2018). Analysing the accounting measurement of financial sustainability in local governments through political factors. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*.
- Slembeck, T., Jans, A., & Leu, T. (2014). A politico-economic perspective on financial sustainability. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*.
- Subires, M. D., & Bolívar, M. P. (2017). Financial Sustainability in Governments. A New Concept and Measure for Meeting New Information Needs. In M. P. Bolívar, *Financial Sustainability in Public Administration*. Granada: Palgrave Macmillan, Cham.
- Subires, M. D. L., Muñoz, L. A., Galera, A. N., & Bolívar, M. P. R. (2019). The influence of socio-demographic factors on financial sustainability of public services: A comparative analysis in regional governments and local governments. *Sustainability (Switzerland)*.
- Wulandari, I., Nugraeni, N., & Wafa, Z. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Distress Pemerintah Daerah.
- BPS. (2022). Badan Pusat Statistik: Sosial dan Kependudukan. <https://www.bps.go.id>

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta 2013-2022.

Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.